

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*). Di dalam perusahaan terdapat pemisah kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal yaitu orang yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan sedangkan agen yaitu orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada prinsipal. Hubungan antara prinsipal dan agen ketika prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan dalam perusahaan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat (Putri 2017). Penerapan *corporate governance* berdasarkan teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, agen secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Pada teori keagenan yang disebut *agent* adalah manajemen dan *principal* adalah pemegang saham atau investor. Seharusnya hubungan antara *principal* dan *agent* menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Namun yang terjadi yaitu timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham atau investor dengan manajemen yang disebut dengan *agency problem* (konflik keagenan). Konflik ini terjadi karena dalam melaksanakan tugas dan wewenang setiap individunya lebih mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan adanya prosedur pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan baik dari pihak pemegang saham maupun manajer. Maka dibentuklah konsep yang dinamakan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dimana diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan konflik dan biaya keagenan yang terjadi serta dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham akan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Nugroho (2017) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian *agent* dapat memanipulasi pelaporan mengenai perusahaan untuk disampaikan kepada *principal*, hal ini dikarenakan setiap manajer mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Teori keagenan digunakan untuk memahami isu *corporate governance* dan manajemen laba.

2.1.2 Teori Keterbacaan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) mengatur bahwa penyusunan laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, yang salah satunya adalah dapat di pahami (*understandability*). Karakteristik tersebut berhubungan dengan tingkat keterbacaan (*readability*). Keterbacaan dalam hubungannya dengan informasi naratif akuntansi didefinisikan sebagai tingkat kesulitan dan keberhasilan dalam mengkomunikasikan informasi akuntansi (Hidayatullah dan Setyaningrum 2018).

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan secara tepat mempresentasikan informasi akuntansi. Oleh karena itu, nilai kegunaan dari laporan akuntansi dapat ditingkatkan dengan memenuhi karakteristik kualitatif berikut:

1. Dapat dipahami, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus mudah untuk dipahami.
2. Tepat waktu, informasi tersedia bagi pengguna laporan pada waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan.
3. Dapat diverifikasi, sehingga dapat meyakinkan pengguna laporan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.

(Saptono dan Wahyu 2014) mendefinisikan keterbacaan sebagai kemudahan dalam memahami teks yang berhubungan dengan gaya penulisan.

Pernyataan ini memberikan arti bahwa gaya penulisan terpisah dari isi teks, keruntutan, dan struktur teks tersebut. Menguji tingkat keterbacaan suatu teks dinilai penting untuk kepentingan pembaca teks. Konsep yang bermula dari rumusan manual dicoba untuk diterjemahkan dalam penelitian ini secara matematis dan komputasi. *Gunning Fog Index* digunakan untuk menghitung tingkat keterbacaan suatu teks. Nilai *Gunning Fog Index* dapat dihitung dengan algoritma Pada *Fog Index*, indikator yang digunakan adalah jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah kata kompleks, dan jumlah kata.

Menurut Christanti, Naga, dan Benedicta (2017) *Gunning Fog Index* biasanya digunakan untuk menjamin bahwa sebuah teks dapat dipahami oleh pembaca. Semakin tinggi hasil *Gunning Fog Index*, berarti semakin mudah teks itu dibaca dan sebaliknya semakin rendah nilai *Fog Index* maka semakin sulit teks itu dibaca. Sehingga, *Gunning Fog Index* dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan sebuah laporan tahunan pada bagian analisis dan diskusi manajemen (MD&A).

2.1.3 Definisi Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015) adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer atau tindakan nyata untuk mempengaruhi baik menaikkan maupun menurunkan laba atau tingkat kerugian yang dilaporkan demi mencapai tujuan sesuai keinginan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi mengenai keadaan perusahaan sesungguhnya dibandingkan pemegang saham. Manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi komponen-

komponen akrual dalam laporan keuangan, karena mudah untuk dimanipulasi sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan, dengan alasan komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik.

Manajer diberikan kepercayaan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengoperasikan dan menjalankan perusahaan dengan baik, dengan wewenang manajemen harus memberikan informasi yang menguntungkan *stakeholder* guna dalam mengambil keputusan perusahaan. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan *stakeholder* kepada manajemen, maka manajemen akan memaksimalkan laba dimana laba merupakan alat ukur kinerja suatu perusahaan. Perilaku manajer yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunity manager* dan *efficient contracting* (Nugroho 2017).

Dengan adanya kepercayaan yang diberikan *stakeholder* kepada manajemen akan memicu manajer melakukan segala cara agar laba perusahaan maksimal meskipun dengan cara yang tidak sesuai. Maka manajemen terindikasi akan melakukan manipulasi laba perusahaan baik menaikkan atau menurunkannya, kegiatan manipulasi ini disebut dengan manajemen laba (*earnings management*). Oleh karena itu manajemen yang melakukan praktik manajemen laba akan berpengaruh terhadap suatu keterbacaan laporan yang dibuat sehingga dapat menyebabkan *principal* salah dalam mengambil keputusan, karena keputusan tersebut ditentukan berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh manajemen.

2.1.4 Definisi Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

Corporate governance atau Tata kelola perusahaan merupakan suatu alat yang dianggap bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Definisi tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menurut Alpha dan Ratna (2017) adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan dimana tujuan utama dari penerapan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi shareholder. Maka *corporate governance* adalah suatu sistem terpadu yang menjaga hubungan antara shareholder dan stakeholder dalam pengelolaan suatu perusahaan sehingga adanya perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik internal perusahaan ataupun pihak eksternal. Terkendalinya kinerja perusahaan akan diawasi dan berdampak pada kepentingan banyak pihak serta dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Terdapat empat pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh OECD yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (tanggungjawab). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pilar:

1. *Fairness* atau keadilan merupakan kesetaraan pemangku kepentingan agar terhindar dari praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak tersebut.

2. *Transparency* atau keterbukaan merupakan ketepatan serta keakuratan atas informasi yang harus diungkapkan antara lain kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas merupakan bentuk pengawasan efektif atas sistem, fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan yaitu antara pengawas, pengurus, pemegang saham, dan auditor.
4. *Responsibility* atau pertanggungjawaban merupakan bentuk kepatuhan atas pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tetap konsisten memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Penerapan *corporate governance* sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana bukan hanya bermanfaat jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor. Menurut Dewi (2016) mengatakan bahwa penerapan *corporate governance* yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik *earnings management* atau manajemen laba.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham yang mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak secara independen (Zahra 2016)

Komisaris Independen diatur dalam surat keputusan No: Kep-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan setiap perusahaan publik harus membentuk Komisaris

Independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris. Menurut Ujitantho dan Pramuka (2007) Komisaris Independen adalah Dewan Komisaris yang tidak berhubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham, serta bebas dari hubungan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris Independen yang proporsinya lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajemen (Effendi dan Daljono 2013). Dikarenakan semakin banyak Komisaris Independen maka pengawasan terhadap manajemen akan bertambah dan manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga manajer membuat laporan tahunan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan mudah dibaca serta di pahami.

Ada beberapa tugas dan tanggungjawab dari Komisaris Independen, yaitu:

1. Memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif
2. Perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku
3. Menjamin prinsip-prinsip *good corporate governance* telah ditetapkan dengan baik khususnya transparansi dan keterbukaan laporan keuangan.

2.1.6 Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan BAPEPAM No: Kep. 29/OM/2004. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang

berasal dari luar perusahaan. Adapun peran dari Komite Audit adalah mengawasi segala aspek dalam suatu perusahaan, maka keberadaannya telah di atur oleh pemerintah.

Keberadaan Komite Audit dianggap sebagai jembatan atau penghubung antara pihak pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen.(Khoiruddin dan Dewi 2016). Sebaiknya Komite Audit memiliki sifat kemandirian (*independen*) yang kuat sehingga memiliki kenetralan dalam pengawasan apa yang dikerjakan dan dilaporkan oleh manajemen. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Komite Audit maka manajemen akan kesulitan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari laporan yang dibuat oleh manajemen, dengan semakin banyaknya Komite Audit maka pengawasan terhadap kinerja manajer akan semakin meningkat, dan manajer dapat berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan laporan tahunan yang akan dibuat, oleh karena itu manajer dapat memperhatikan tingkat kesulitan keterbacaan laporan yang dibuat.

2.1.7 Keterbacaan Laporan Tahunan

Konteks keterbacaan mengandung arti sebagai hal yang mampu dibaca dan dipahami tergantung dengan tingkat kesukaran suatu teks dan juga dilihat dari kompleksitas penulisnya. Menurut Saptono dan Wahyu (2014) Keterbacaan atau *readability* adalah seluruh unsur yang ada dalam teks (termasuk interaksi antar teks) yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembaca dalam memahami materi yang dibaca dengan kecepatan membaca yang optimal. Putri (2018)

mendefinisikan keterbacaan sebagai kemudahan dalam memahami teks yang berhubungan dengan gaya penulis.

Menurut Suripto (2013) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan bagian naratif, pada bagian naratif berisi penjelasan manajemen terhadap kinerja perusahaan dan keadaan perusahaan masa depan. Pada bagian naratif laporan tahunan, biasanya perusahaan akan menyajikan dalam bentuk singkat atau dalam bentuk penjelasan yang panjang. Menurut Arif (2018) perusahaan yang mengalami kerugian akan memberikan banyak penjelasan. Sifat konservatisme akuntansi mengenali berita buruk secara lebih tepat daripada mengenali berita baik yang mengharuskan manajemen untuk memberikan lebih banyak penjelasan mengenai kerugian yang dialaminya.

Dalam membaca laporan tahunan diperlukan juga pemahaman dari isi laporan keuangan tersebut, karena tingkat pemahaman dalam pembacaan laporan tahunan akan mempengaruhi kualitas dari pengambilan. Keterbacaan bisa diartikan sebagai ukuran susah atau mudahnya suatu bacaan (Christiani, Naga, Benedicta 2017). Pentingnya pemahaman pengguna laporan tahunan dalam memahami isi dari laporan tersebut berguna sebagai pengambilan keputusan pada masa yang akan datang, dengan demikian keterbacaan laporan tahunan dapat diartikan sebagai tingkat sukar atau tidaknya suatu laporan untuk dipahami dan di baca oleh pengguna.

Arif (2018) menyatakan bahwa laporan tahunan yang mudah terbaca dan dipahami adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengikat para pemegang saham. Sehingga keterbacaan merupakan ukuran penting dalam

penilaian kualitas dokumen keuangan. Sebuah penelitian yang menggunakan *Index Fog* atau perhitungan jumlah kata dalam memahami keterbacaan menjelaskan tingkat kompleksitas hubungan (Loughran and McDonal 2011; Defranco at al 2013; Li 2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan beberapa manajer mencoba untuk menyembunyikan penghasilan dengan menggunakan laporan tahunan yang kompleks dalam penggunaan bahasanya sehingga susah dan rumit untuk dimengerti.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait *corporate governance*, manajemen laba terhadap keterbacaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lo, Ramos dan Rogo (2017) yang berjudul “*Earnings Management and Anuual Report Readability*” menghasilkan bahwa perusahaan yang manajemen labanya telah memenuhi target laba tahun sebelumnya memiliki laporan tahunan yang lebih kompleks pada bagian Analisis dan Diskusi Manajemen dan membuat laporan tahunan yang lebih sulit dibaca. Artinya bahwa dengan adanya manajemen laba maka dapat mempengaruhi keterbacaan laporan tahunan.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan *leverage* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Batu-*Bara*” yang diteliti oleh Mawardi, dkk (2019) menghasilkan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, kemudian variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan

terhadap manajemen laba dan *free cash flow* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Jin-hui, Xue dan Huayang (2018) dengan judul “*Annual Report Readability and Corporate Agency Costs*” menghasilkan penelitian bahwa perusahaan dengan keterbacaan laporan tahunan yang lebih tinggi memiliki biaya agensi yang lebih rendah antara pemegang saham dan manajer dan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan hubungan negatif antara keterbacaan laporan tahunan dan biaya agen perusahaan.

Penelitian tentang “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance, Free Cash Flow* dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba pada 14 Perusahaan Tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011” yang diteliti oleh Agustia (2013). Hasil dari penelitian tersebut adalah *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage ratio* berpengaruh terhadap manajemen laba, dan variabel *free cash flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang diteliti oleh Suropto (2013) yang berjudul “Manajemen Laba dan Manajemen Impresi dalam Laporan Tahunan: Penelitian Strategi Pengungkapan Perusahaan” menghasilkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap manajemen impresi, hal tersebut terjadi karena praktik manajemen laba mengurangi manajer dalam memberikan penjelasan yang dapat mengungkapkan informasi yang berguna bagi *stakeholder*.

Penelitian oleh Partami, Sinarwati dan Darmawan (2015) yang berjudul “Pengaruh Manajemen Laba Rill Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi” menghasilkan bahwa manajemen laba rill berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan untuk variabel moderasinya adalah *coorporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba rill terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Kusumawati, Sari dan Trisnawati (2013) dengan judul “Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Praktik *Earnings Management*”. Hasilnya yaitu asimetri informasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Penelitian oleh Kusumawati, Trisnawati dan Mardalis (2015) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Rill” yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba rill.

Penelitian yang dilakukan oleh Yufenti (2013) tentang “Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan *Corporate Governanace* sebagai Variabel Moderasi “ menghasilkan bahwa variabel komite audit memoderasi manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. Sedangkan variabel

dewan komisaris independen memoderasi manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan

Teori keagenan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan. Perbedaan dalam hal tersebut menjadikan manajer memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan pemilik, hal ini dapat dijadikan celah bagi manajer untuk memanipulasi laporan tahunan sehingga terjadi yang namanya manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Lo, Ramos dan Rogo (2017) menemukan bahwa perusahaan yang mengelola laba untuk memenuhi target laba tahun sebelumnya rata-rata memiliki laporan tahunan yang lebih kompleks pada bagian Analisis dan Diskusi Manajemen (MD&A) dan membuat laporan keuangan yang lebih sulit untuk dibaca. Tindakan manajemen laba yang dilakukan mengurangi kemungkinan manajer memberikan penjelasan yang dapat mengungkapkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan untuk mengetahui tindakan manajemen laba.

H₁ : Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap keterbacaan laporan tahunan

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan

Komisaris Independen adalah posisi terbaik dalam terciptanya *good corporate governance* (Dew, Sari dan Abaharis, 2018). Proporsi Dewan Komisaris diukur berdasarkan persentase anggota Dewan Komisari yang berasal dari eksternal perusahaan dan dari keseluruhan anggota dan komisaris perusahaan.

Dewan Komisaris adalah bagian dari Dewan Manajemen perusahaan yang secara bersama-sama bertanggungjawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggungjawab atas penerapan *corporate governance* di perusahaan, tetapi Dewan Direksi tidak dapat berpartisipasi dalam keputusan operasional perusahaan (Nurdiana dan Junaidi 2019).

Dengan adanya Dewan Komisaris Independen dapat mendorong perilaku manajer untuk bertindak hati-hati dan sesuai dengan prosedur dalam pengambilan keputusan, karena manajer diawasi oleh Dewan Komisaris Independen serta mengurangi timbulnya teori keagenan. Dengan adanya pengawasan dari Dewan Komisaris Independen maka laporan tahunan yang akan dibuat oleh manajer akan mudah untuk dibaca supaya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap keterbacaan laporan tahunan

2.3.3 Pengaruh Komite Audit dengan Keterbacaan Laporan Tahunan

Salah satu tanggungjawab Komite Audit adalah mendalami informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan juga bertujuan untuk membantu dan

mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan *corporate governance*, memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi yang diberikan oleh perusahaan telah disajikan secara transparan, handal dan terpercaya.

Perusahaan yang mengelola laba untuk memenuhi target laba sebelumnya biasanya akan membuat laporan tahunan yang lebih kompleks dan sulit dibaca pada bagian Analisis dan Diskusi Manajemen (Lo, Ramos & Rogo, 2017). Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya proporsi anggota Komite Audit yang ahli di bidang keuangan dapat meningkatkan pengawasan pemilik perusahaan terhadap manajemen dan laporan keuangan yang dibuat manajemen akan lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adapun laporan tahunan yang dibuat oleh manajer tidak akan menyesatkan pengguna laporan dan mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan adanya pengawasan dari Komite Audit maka laporan tahunan akan dibuat secara mudah untuk dibaca agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan.

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap keterbacaan laporan tahunan

2.3.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen memoderasi Manajemen Laba terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengandali. Hal ini mendukung penelitian Dechow *et al* (1995) bahwa perusahaan

memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki *Chief Executive Officer* (CEO) yang merangkap menjadi *chairman of board*.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian sebelumnya maka dapat diasumsikan bahwa adanya komisaris independen dan manajemen laba maka akan mempengaruhi tingkat keterbacaan laporan tahunan. Ada beberapa pandangan yang mengatakan manajemen laba bukan sebagai kecurangan yang dilakukan manajer perusahaan, prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa manajer harus mengungkapkan secara lengkap semua informasi dalam pelaporan keuangan juga tidak mampu membuat pemakai laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan itu melakukan manajemen laba atau tidak. Akuntansi memang tidak mengharuskan suatu perusahaan untuk selalu mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena, itu dengan adanya dewan komisaris independen maka manajemen laba akan berpengaruh positif terhadap keterbacaan laporan tahunan.

H₄ : Dewan Komisaris Independen Memoderasi Manajemen Laba berpengaruh terhadap Keterbacaan laporan Tahunan

2.3.5 Pengaruh Komite Audit memoderasi Manajemen Laba terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan

Keberadaan komite audit sangat penting dalam pengelolaan perusahaan karena dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan

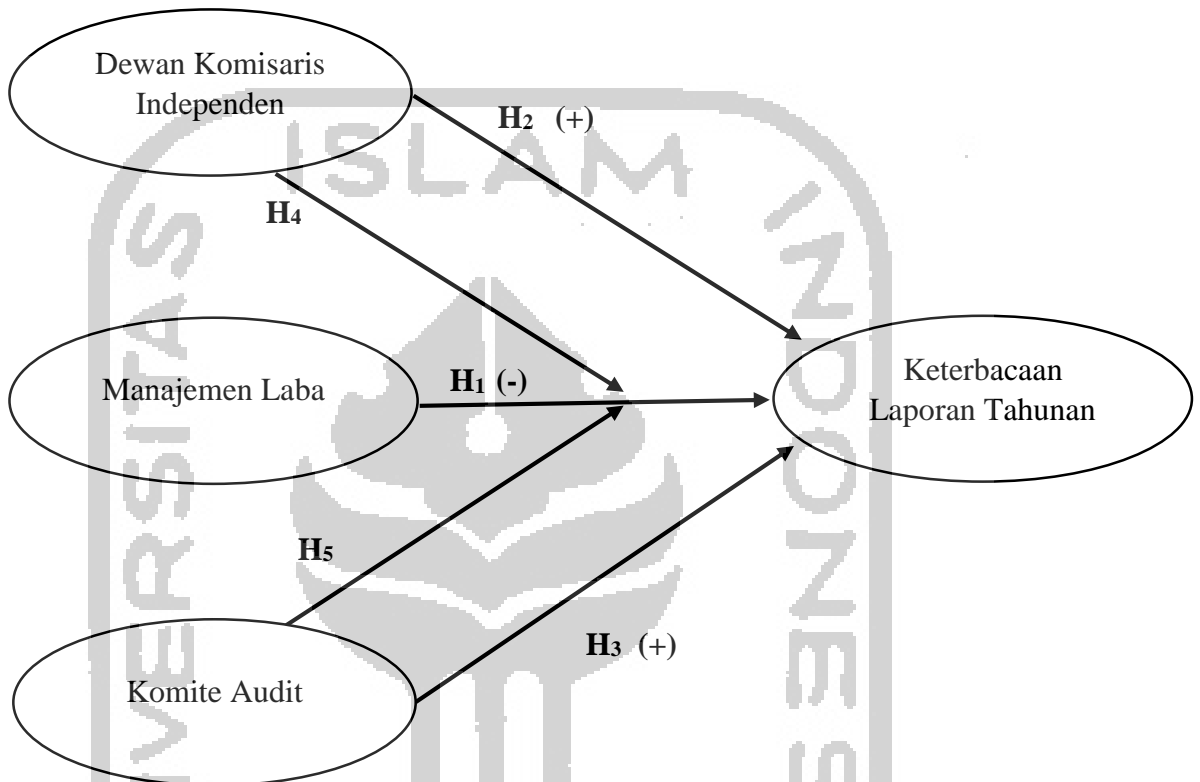
komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Keberadaan komite audit untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen relevan atau disajikan sebagaimana mestinya, agar mudah di baca dan dapat dijadikan dalam mengambil keputusan. Peran komite audit sangat penting untuk mempengaruhi kualitas laba perusahaan karena salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan digunakan investor untuk menilai perusahaan. Dengan adanya peran dari komite audit dan manajemen laba akan mempengaruhi keterbacaan laporan tahunan, keterbacaan laporan tahunan akan meningkat atau laporan tahunan akan mudah di pahami dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Yufenti (2013) komite audit memoderasi manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. Hasil interaksi antara komite audit dengan manajemen laba ternyata berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggungjawab sosial.

H₅ : Komite Audit Memoderasi Manajemen Laba Berpengaruh terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



Pada gambar kerangka pemikiran di atas, terdapat variabel independen yaitu manajemen laba, variabel moderasi dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan variabel dependennya adalah keterbacaan laporan tahunan.